

*(Original Article)*

# Evaluasi Program PAMSIMAS: Studi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung

**Fitriah Junaeny<sup>1</sup>, Darmanto<sup>2</sup>, Titi Darmi<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia<sup>2</sup>Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia<sup>3</sup>Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia\*Correspondence: [fjunaeny.ut@gmail.com](mailto:fjunaeny.ut@gmail.com)**Abstract**

This study aims to determine the evaluation of the implementation policy of community-based drinking water and sanitation provision (PAMSIMAS) in Muruk Rian District, Tana Tidung Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach with a research focus on policy evaluation criteria consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy of PAMSIMAS policy implementation. Informants in this study were the Head of Bappeda and Litbang, Village Head, PAMSIMAS Facilitator, Pokja, Disaster Management Group and PAMSIMAS beneficiary communities. Data sources in this study consist of two, namely primary and secondary data sources. Data collection techniques are observation, interviews and documentation with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that overall the implementation of the PAMSIMAS policy in the target villages in Muruk Rian District is running well, this can be seen from the policy evaluation indicators such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of the implementation of the development and development of PAMSIMAS facilities and infrastructure can meet the needs of the target community and this policy can overcome the access gap for communities far from urban centers, especially communities who do not yet have access to PDAM water.

**Keywords**

community, drinking water, evaluation, policy, sanitation

Received: 26 September 2024; Revised: 30 November 2024; Accepted: 21 April 2025

**Pendahuluan**

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program nasional yang telah diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Namun, implementasi program ini di Kecamatan Muruk Rian masih menghadapi berbagai persoalan yang menghambat pencapaian tujuan program. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Program PAMSIMAS Tahun Anggaran 2018–2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Utara tahun 2020, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, khususnya terkait akses terhadap sumber air baku, keterbatasan sarana sanitasi, serta lemahnya pengelolaan sarana yang telah dibangun.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Muruk Rian adalah keterbatasan pasokan air bersih. Hingga saat ini, desa-desa di wilayah tersebut belum terlayani oleh jaringan air minum dari PDAM, sehingga masyarakat masih bergantung

pada sumber air alami seperti sungai, mata air pegunungan, dan sumur bor (BPKP, 2020). Hasil observasi awal peneliti pada tahun 2023 menunjukkan bahwa distribusi air sangat bergantung pada kondisi geografis yang sulit dijangkau serta fluktuasi musim yang mempengaruhi ketersediaan air baku. Selain itu, kondisi ini diperburuk oleh belum adanya sistem pengelolaan air terpadu yang dapat menjamin distribusi secara adil dan berkelanjutan ke seluruh rumah tangga.

Selain permasalahan air bersih, akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak juga masih rendah. Berdasarkan laporan BPKP (2020), sebagian besar rumah tangga di Kecamatan Muruk Rian belum memiliki jamban sehat dan masih menerapkan praktik buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kasus diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan penyakit kulit. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadi tantangan dalam upaya peningkatan sanitasi. Program edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Masalah lain yang turut menghambat keberhasilan program adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun. Berdasarkan data BPKP (2020), banyak fasilitas air bersih yang hanya berfungsi sebagian atau tidak berfungsi sama sekali karena tidak adanya sistem pemeliharaan yang memadai. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang seharusnya menjadi ujung tombak pemeliharaan, belum berjalan optimal akibat kurangnya pelatihan teknis dan keterbatasan dana operasional. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa sebagian besar warga masih mengandalkan pemerintah desa untuk perbaikan, tanpa kontribusi atau keterlibatan aktif dalam pengelolaan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Dalam laporan BPKP (2020) disebutkan bahwa monitoring dan evaluasi program oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara berkala, sehingga berbagai hambatan teknis dan administratif tidak teridentifikasi sejak dini. Selain itu, koordinasi antara instansi pelaksana, seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta mitra pembangunan seperti lembaga donor, belum berjalan sinergis. Hal ini menyebabkan implementasi PAMSIMAS di Muruk Rian tidak optimal dalam mendukung capaian target nasional akses 100% air minum dan sanitasi layak.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan program PAMSIMAS sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan dukungan institusional yang kuat. Puspita et al. (2023) dalam penelitiannya di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa keberlanjutan program dipengaruhi oleh keterlibatan aktif warga dalam pemeliharaan fasilitas. Sementara itu, Amalia (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan program di Provinsi Sumatera Barat ditentukan oleh adanya dukungan regulasi dan alokasi anggaran yang jelas dari pemerintah daerah. Studi-studi tersebut menjadi pembandingan yang relevan untuk mengevaluasi kelemahan implementasi PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian, yang pada konteksnya memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda namun menghadapi permasalahan serupa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, dengan menggunakan pendekatan evaluatif berbasis data empiris dari laporan resmi dan hasil observasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan strategi implementasi ke depan. Evaluasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan program PAMSIMAS, meningkatkan akses masyarakat

terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-6.

## **Kajian Pustaka**

### **Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Sokoy et al., (2020) evaluasi sebagai proses kompleks, yakni mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan performa dan keefektifan kebijakan dengan tujuan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan, memberikan solusi, dan membangun kebijakan lebih efektif di masa depan. Perbedaannya adalah (evaluasi) tidak hanya sekedar tentang pengumpulan data atau hubungan antara input dan output melainkan juga tentang efek dan akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan, (Handayani & Rofii, 2023). Berkenaan dengan evaluasi kebijakan, evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik. Lester & Stewart, (2000) menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Sehingga menurut Lester & Stewart, (2000) evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalannya dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya

Menurut Winarno, (2016) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan, tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang, (Winarno, 2016). Menurut (Suaib & dkk, 2022; Subianto, 2020) bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Penjelasan ini mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan. Sementara itu, (Rossi et al., 1988) mengemukakan bahwa: "Evaluations are conducted to answer a variety of questions of related to that we have listed as the three focus of evaluation research: program conceptualization and design, program implementation (Monitoring and accountability) and program utility (impact and efficiency assessments)".

Dunn, (2003) menjelaskan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pembagian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, menurut Nugroho, (2021) bahwa evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan.

Untuk mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk menilai keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Dunn,

(2003) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu 1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 3) Kecukupan; 4) Pemerataan; 5) Resposivitas; dan 6) Ketepatan.

### **Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat**

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau yang disebut dengan Program Pamsimas merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, (Pratama & Isnani, 2018). Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai 100% akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan pada tahun 2019 atau disebut juga dengan Universal Access 2019. Pamsimas merupakan perwujudan usaha pemerintah dalam melaksanakan amanah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang yang dikembangkan dalam Perpres RPJM 2015-2019.

Menurut Ditjen Cipta Karya, (2022) pendekatan berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan. Proses tersebut mengajak masyarakat untuk menemu-kenali berbagai permasalahan terkait dengan air minum dan sanitasi, kemudian dibimbing untuk melakukan berbagai langkah solusi dan pencegahannya termasuk membangun sarana yang dibutuhkan seperti sarana air minum dan sanitasi serta membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Oleh sebab itu, di tingkat nasional program Pamsimas dikelola oleh lintas kementerian, yaitu Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. Sedangkan, di tingkat desa/kelurahan program ini menganut pendekatan berbasis masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Program Pamsimas adalah program yang bersifat nasional dan melibatkan berbagai unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuan sehingga memerlukan pedoman yang mengatur pelaksanaannya. Menurut (Astuti & Rahdriawan, 2013; Insani, 2016) sekurang-kurangnya ada 4 (empat) hal yang ingin dicapai dalam program Pamsima, yaitu: 1) Ada kesamaan pandang antara pelaku Pamsimas di berbagai tataran mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh program; 2) Ada tuntunan bagi para pelaku Pamsimas dalam melaksanakan kegiatan Pamsimas di desa/kelurahan; 3) Ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja Pamsimas di desa/kelurahan sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi secara nasional untuk menentukan apakah program berhasil atau tidak; dan 4) Memudahkan replikasi atau adopsi oleh para pelaku yang berbeda.

Evaluasi kebijakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat menjadi aspek krusial dalam menilai efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Meskipun berbagai kajian telah dilakukan terkait evaluasi kebijakan publik (Lester & Stewart, 2000; Winarno, 2016; Dunn, 2003), masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat memengaruhi implementasi kebijakan, terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Tana Tidung. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada hubungan input-output dan indikator keberhasilan program, sementara aspek keberlanjutan serta partisipasi masyarakat dalam menilai efektivitas kebijakan masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana kebijakan penyediaan air minum

dan sanitasi berbasis masyarakat dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat setempat. Selain itu, dalam konteks Program Pamsimas yang diterapkan secara nasional, evaluasi terhadap efektivitas koordinasi antar-lembaga dan peran pemerintah daerah masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Studi sebelumnya (Pratama & Isnani, 2018; Ditjen Cipta Karya, 2022) telah membahas pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi. Namun, masih ada keterbatasan dalam menilai bagaimana koordinasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, serta strategi pemeliharaan infrastruktur memengaruhi keberlanjutan program di daerah perdesaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini telah berhasil diimplementasikan dan apakah tujuan utama dari program, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui akses air bersih dan sanitasi yang layak, telah tercapai secara optimal di Kabupaten Tana Tidung.

Saat ini, tema yang berkembang dalam evaluasi kebijakan air minum dan sanitasi tidak hanya berfokus pada dampak kesehatan, tetapi juga menyoroti aspek ekonomi, sosial, dan teknologi. Keberlanjutan program menjadi tantangan utama, mengingat banyak proyek serupa mengalami kesulitan dalam pemeliharaan dan pengelolaan pasca-intervensi. Selain itu, pendekatan evaluasi yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penilaian kebijakan menjadi isu yang semakin relevan. Pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring dan evaluasi juga mulai dikembangkan untuk memastikan efektivitas program secara lebih transparan dan akurat. Dengan mempertimbangkan kesenjangan dan tema yang berkembang tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam mengisi kekosongan kajian sebelumnya, khususnya dalam konteks Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan keberlanjutan kebijakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan koordinasi antar-lembaga, memberdayakan masyarakat, dan memastikan dampak jangka panjang yang positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2022; Suprianto, 2024) yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan program PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung. Fokus evaluasi dalam penelitian ini mengacu pada model evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003), yang mencakup enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap kondisi fisik fasilitas air bersih dan sanitasi, pemanfaatan air oleh masyarakat, kondisi lingkungan sekitar, tingkat partisipasi masyarakat, serta kinerja kelompok pengelola PAMSIMAS (KPSPAMS). Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap masyarakat penerima manfaat, pemerintah daerah (melalui Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Bappeda), pengelola PAMSIMAS di tingkat desa, fasilitator program, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi seperti notulen wawancara, catatan kegiatan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah daerah, laporan LHP BPKP Kalimantan Utara tahun 2020, serta artikel ilmiah yang relevan (Creswell, 2014; Sugiyono, 2022). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi antara hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

## Hasil

Mengacu pada fokus penelitian, maka pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkenaan dengan evaluasi kebijakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung dengan indikator kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Dunn, (2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, resposivitas, dan ketepatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### Efektivitas

Keseriusan pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih diwujudkan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Muruk Rian dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tana Tidung yang memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani, termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban, yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Tana Tidung. Selain analisis dokumen diatas, hasil observasi di lokasi penelitian menunjukkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana penyediaan air bersih dan sanitasi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah di desa telah memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan air bersih dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

**Tabel 1.**  
**Daftar Desa Sasaran Program PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung (APBN-Hibah Khusus Pamsimas (HKP))**

| No | Desa        | Tahun |      |      | Jenis Kegiatan                  | Item                             | Status    |
|----|-------------|-------|------|------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
|    |             | 2018  | 2019 | 2021 |                                 |                                  |           |
| 1  | Rian Rayo   | √     |      |      | Pembangunan Saprasi Air Bersih  | PMA, IPA, Reservoir              | Berfungsi |
| 2  | Rian        | √     |      |      | Pembangunan Saprasi Air Bersih  | Embung, Reservoir, Jaringan Pipa | Berfungsi |
| 3  | Kapuak      | √     |      |      | Pembangunan Saprasi Air Bersih  | Embung, Reservoir dan IPA, CTSP  | Berfungsi |
| 4  | Seputuk     | √     |      |      | Pembangunan Saprasi Air Bersih  | IPA, Reservoir, Embung           | Berfungsi |
| 5  | Belayan Ari | √     |      |      | Pembangunan Saprasi Air Bersih  | Embung, IPA, Reservoir           | Berfungsi |
| 6  | Sapari      |       | √    |      | Pembangunan Saprasi Air Bersih  | Bangunan Reservoir, IPA          | Berfungsi |
| 7  | Sapari      |       |      | √    | Pengembangan Jaringan Perpipaan | Jaringan Perpipaan               | Berfungsi |

Sumber: hasil analisis data penelitian, 2024

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2021 Kecamatan Muruk Rian telah merealisasikan kegiatan pembangunan dan pengembangan penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat yang tersebar di beberapa desa sebagaimana pada tabel 4.2 yang penganggarannya berasal dari APBN-Hibah Khusus Pamsimas (HKP) yang sampai saat ini masih berfungsi dan digunakan oleh masyarakat setempat. Selain alokasi anggaran dari APBN-Hibah Khusus Pamsimas (HKP), hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga telah melaksanakan pembangunan dan pengembangan penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Muruk Rian yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa Sasaran Pamsimas

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di lokasi penelitian menjelaskan bahwa Kegiatan Pamsimas merupakan Program penyediaan air minum berbasis masyarakat dimana masyarakat dapat merencanakan sistem sarana air bersih menyesuaikan dengan kondisi sumber air dalam desa mereka, yang sejauh ini sangat efektif untuk dapat menyediakan layanan air bersih sampai ke rumah masyarakat mengingat akses PDAM terbatas untuk dapat menjangkau desa-desa yang jauh dari pusat perkotaan atau pembangunan IPA di Kabupaten Tana Tidung. Selain itu, hasil observasi dan analisis dokumen diketahui bahwa ditinjau dari tujuan dan sasarannya menunjukkan bahwa kegiatan PAMSIMAS yang telah direalisasikan di desa-desa Kecamatan Muruk Rian berjalan dengan efektif karena sampai saat ini fasilitas sarana dan prasarana Pamsimas masih dinikmati oleh masyarakat penerima. Selain itu, dengan adanya Pamsimas ini secara signifikan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat setempat.

### Efisiensi

Berdasarkan analisis data sekunder dari laporan realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian yang tersebar di 6 Desa dari tahun 2018-2021 disajikan pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2.**  
**Rincian Anggaran Desa Penerima Pamsimas di Kecamatan Muruk Rian**

| No           | Desa        | Alokasi Dana |      |      |      | Anggaran             | Realisasi            |
|--------------|-------------|--------------|------|------|------|----------------------|----------------------|
|              |             | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 |                      |                      |
| 1            | Rian Rayo   | √            |      |      |      | 785.000.000          | 785.000.000          |
| 2            | Rian        | √            |      |      |      | 350.000.000          | 350.000.000          |
| 3            | Kapuak      | √            |      |      |      | 350.000.000          | 350.000.000          |
| 4            | Seputuk     | √            |      |      |      | 350.000.000          | 350.000.000          |
| 5            | Belayan Ari | √            |      |      |      | 350.000.000          | 350.000.000          |
| 6            | Sapari      |              | √    |      |      | 415.000.000          | 415.000.000          |
| 7            | Seputuk     |              |      | √    |      | 135.000.000          | 135.000.000          |
| 8            | Belayan Ari |              |      | √    |      | 105.000.000          | 105.000.000          |
| 9            | Sapari      |              |      |      | √    | 160.000.000          | 160.000.000          |
| <b>Total</b> |             |              |      |      |      | <b>2.995.000.000</b> | <b>2.995.000.000</b> |

Sumber: Laporan Fasilitator Masyarakat Kabupaten Tana Tidung, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dari tahun 2018-2020 telah dilaksanakan dan direalisasikan dengan total anggaran Rp. 2.995.000.000,- yang anggarannya bukan hanya berasal dari APBN-PAMSIMAS, namun juga berasal dari DAK Air Minum untuk Desa Sasaran PAMSIMAS, APBN-Hibah Khusus Pamsimas (HKP), APBDes, INCASH Desa, dan INCAND Desa. Khusus untuk tahun 2020, keberlanjutan Pamsimas anggarannya melalui DAK Cadangan 2020, dimana Regulasi yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 mengenai perubahan postur dan rincian APBN Tahun Anggaran (TA) 2020. Berdasarkan hasil analisis data pada laporan keuangan/dana alokasi khusus (DAK) PAMSIMAS pengembangan jaringan perpipaan Desa Seputuk sebesar Rp. 135.000.000,- dan pengembangan jaringan Desa Belayan Ari sebesar Rp. 105.000.000,- dicairkan kedalam 2 tahap sebagaimana pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3.**  
**Proses pencairan anggaran DAK PAMSIMAS**

| No | Desa        | Pencairan     |                | Realisasi     |
|----|-------------|---------------|----------------|---------------|
|    |             | Tahap I (50%) | Tahap II (50%) |               |
| 1  | Seputuk     | 67.500.000,-  | 67.500.000,-   | 135.000.000,- |
| 2  | Belayan Ari | 52.500.000,-  | 52.500.000,-   | 105.000.000   |

Sumber: Laporan Keuangan Fasilitator Masyarakat Kab. Tana Tidung, 2024

Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa kinerja sumber daya manusia dalam merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pamsimas di 6 Desa penerima Pamsimas berjalan dengan baik. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan di lokasi penelitian yang menjelaskan bahwa pengelolaan PAMSIMAS yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan di Kecamatan Muruk Rian berjalan dengan efisien, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa pemanfaatan sumber daya anggaran, manusia dan sarana dan prasaran dikelola dengan baik yang dimulai dari tingkat Kabupaten hingga pada tingkat masyarakat itu sendiri dengan terbentuknya Pokja-Pokja, seperti KMM dan BPSPAMS.

### **Kecukupan**

Keseriusan pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan agenda nasional Pamsimas dimanifestasikan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Tan Tidung Nomor 54 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Tahun 2016-2036. Analisis dokumen menunjukkan bahwa 6 Desa di Kecamatan Muruk Rian sebagaimana pada tabel 4 dan 2 merupakan desa yang masuk dalam rencana pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terbagi dalam zona wilayah pengembangan yang dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4.**  
**Zona Pengembangan SPAM di Pedesaan Kabupaten Tana Tidung**

| Zona | Wilayah Pengembangan   |
|------|--|
| 1    | Tideng Pale, Limbu Sedulun, Sedulun, Sebidai, Sebawang, Seludau, Sesayap, Sepala Dalung, Tideng Pale Timur |
| 2    | Sapari, Gunawan, Rian  |
| 3    | Kujau, Bebakung, Buang Baru, Mendupo, Maning Periuk  |
| 4    | Sengkong, Bandan Bikis, Bebatu   |
| 5    | Tengku Dacing, Sambungan, Tana Merah, Sambungan Selatan, Tana Merah Barat                                  |
| 6    | Seputuk, Belayan Ari, Kapuak, Rian Rayo  |
| 7    | Majelutung   |
| 8    | Maning, Priuk  |

Sumber: RI-SPAM Kab. Tana Tidung

Tabel 4 menunjukkan bahwa Desa Dapari dan Desa Rian masuk dalam zona 2 (dua) pengembangan SPAM dan Desa Seputuk, Belayan Ari, Kapuak, Rian Rayo masuk dalam zona 6 (enam) pengembangan SPAM. Adapun dasar pembagian zona terbentuk karena beberapa faktor, yaitu 1) Ketersediaan sumber air baku; 2) Jarak antar lokasi pelayanan; dan 3) Topografi.

Hasil analisis dokumen pada laporan akhir RI-RISPAM Kabupaten Tana Tidung menjelaskan bahwa yang menjadi dasar desa-desa yang ada di Kecamatan Muruk Rian menjadi desa sasaran pelayanan kebijakan Pamsimas, karena Desa di Kecamatan tersebut diluar jangkauan PDAM Kabupaten Tana Tidung. Sehingga sebagaimana tabel 4

menunjukkan hingga saat ini di Kecamatan Muruk Rian telah dilakukan pengembangan dan pembangunan fasilitas sarana dan prasana penyediaan air dan sanitasi yang sampai pertengahan tahun 2024 berstatus aktif, serta dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.

### Pemerataan

Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Muruk Rian pada tahun 2021 sebanyak 531 KK yang tersebar di 6 (enam) desa sasaran PAMSIMAS. Sedangkan, dari tahun 2018-2021 penerima manfaat pengembangan dan pembangunan fasilitas air dan sanitasi di Kecamatan Muruk Ria sebanyak 390 Kepala Keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyebaran penerima manfaat dari penyediaan air bersih dan sanitasi Sebagian besar dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat di Kecamatan Muruk Rian dari jumlah total Kepala Keluarga. Hasil observasi dan wawancara peneliti juga menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas air dan sanitasi sudah tersebar di berbagai titik-titik tertentu sesuai dengan laporan dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pamsimas dan hingga saat ini masih berstatus aktif dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Muruk Rian.

### Responsivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini Kabupaten Tana Tidung hanya memiliki 5 unit pelayanan SPAM yang bersumber dari PDAM Kabupaten Tana Tidung dan Kecamatan Muruk Rian merupakan daerah yang tidak mendapatkan layanan PDAM karena dipengaruhi oleh faktor geografis. Komitmen pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan pemerataan kebutuhan air bersih bagi masyarakat daerah-daerah yang dijangkau oleh PDAM khususnya di Kecamatan Muruk Rian dimanifestasikan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Rencan Induk Sistem Penyediaan Air Minum melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana PAMSIMAS yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018-2021 yang sumber anggarannya sebagaimana telah dijelaskan pada indikator sebelumnya.

Selain itu, Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa 6 Desa sasaran PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian didasari oleh perhitungan proyeksi kebutuhan air yang digunakan oleh masyarakat yang dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Muruk Rian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini:

**Tabel 5.**  
**Proyeksi Kebutuhan Air di Kecamatan Muruk Rian**

| Indikator   | Satuan      | 2016 | 2019 | 2021 | 2026  | 2031  | 2036  |
|---|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Akumulasi Kebutuhan Air (Domestik + Non Domestik) | Liter/Detik | 0,19 | 4,63 | 5,43 | 7,60  | 10,83 | 15,43 |
| Kebocoran (20%)                                   | Liter/Detik | 0,04 | 0,93 | 1,07 | 1,52  | 2,17  | 3,09  |
| Kebutuhan Q Rata-rata                             | Liter/Detik | 0,22 | 5,56 | 6,41 | 9,12  | 13,00 | 18,51 |
| Kebutuhan Jam Puncak                              | Liter/Detik | 0,34 | 8,34 | 9,61 | 13,49 | 19,49 | 27,77 |
| Kebutuhan Harian Maksimum                         | Liter/Detik | 0,25 | 6,12 | 7,05 | 10,04 | 14,30 | 20,36 |

Sumber: RI-SPAM 2018

Tabel 5 menunjukkan bahwa proyeksi kebutuhan air yang disajikan pada tabel diatas adalah perkiraan air pada kondisi eksisting 2016, tahun pencapaian SDG's 2019 dan tahun akhir rencana 2036. Pada tahun 2016 kebutuhan air wilayah pelayanan Kecamatan Muruk Rian sebesar 0,22 liter/detik. Kebutuhan air diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya mengikuti pola pertumbuhan penduduk di wilayah. Pada tahun 2021 rencana kebutuhan air wilayah pelayanan di Kecamatan Muruk Rian diperkirakan sebesar 6,41 liter/detik.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa responsivitas kebijakan PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mengenali, memahami, dan menanggapi kebutuhan, tuntutan, serta aspirasi masyarakat secara efektif sehingga PAMSIMAS dapat dimanfaatkan oleh Sebagian besar masyarakat di Desa Sasaran.

### **Ketepatan**

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah sebuah kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan utama meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat, khususnya di daerah perdesaan dan pinggiran kota. Dari aspek penggunaan anggaran yang sudah disajikan pada Tabel 4.4 menunjukkan bahawa adanya kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran pada pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan PAMSIMAS sehingga fasilitas sarana dan prasarana penyediaan air dan sanitasi dapat terpenuhi dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa sasaran guna keperluan rumah tangga dan aktivitas lainnya. Selain itu, pengoptimalan dalam pemberdayaan sumber daya manusia sehingga PAMSIMAS berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Irwanto salah satu petugas teknik Pamsimas perwakilan BPPW Kaltara menambahkan bahwa: “salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pengembangan dan pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh warga karena lahir dari hasil kerja masyarakat itu sendiri, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan kemandirian masyarakat dapat meringankan beban dalam memelihara Program Pamsimas untuk tetap berfungsi optimal”.

Senada dengan, Ibu Regina Erlia selaku Pengelola Data dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tan Tidung menjelaskan bahwa: “Untuk pengelolaan dana Pamsimas ini dikelola langsung oleh masyarakat dimana masyarakat membentuk kelompok kerja disebut POKMAS yang dipilih melalui rebug warga dan di SK kan oleh kepala Desa, Dana Pamsimas dikelola dengan Pembukuan yang telah disediakan format pembukuannya dan didampingi langsung oleh Pendamping/ Fasilitator Pamsimas yang setiap pencairan dibuatkan Laporan Penggunaan Dana oleh Bendahara Pokmas’.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dokumen menunjukkan bahwa kebijakan PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian dikategorikan tepat sasaran dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018-2021 dan Sebagian besar sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan akses PDAM karena dipengaruhi oleh faktor geografis.

### **Diskusi**

Hasil penelitian berkenaan dengan evaluasi kebijakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung dengan indikator kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Dunn, (2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, resposivitas, dan ketepatan di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Efektivitas**

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, (Hirawan & Dinarwati, 2022). Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. (Ramdhani & Ramdhani, 2017; Sutmasa, 2021) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal

dijelaskan oleh (Daniarsyah, 2020) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Merujuk pada penjelasan diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pamsimas di Kabupaten Tana Tidung yang tersebar di beberapa Desa yang ada di wilayah Kecamatan Muruk Rian berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator capaian pelaksanaan kebijakan Pamsimas sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, yaitu:

- (1) Kesesuaian Penetapan Desa Sasaran, yaitu sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Kerja mengenai penetapan Desa sasaran Pamsimas baik dari anggaran APBN-Hibah Khusus Pamsimas (HKP), maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah merealisasikan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan jumlah anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintah, yaitu pengembangan dan terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana Pamsimas di 8 (delapan) Desa yang tersebar di Kecamatan Muruk Rian.
- (2) Akses RT terhadap Sarana Air Minum yang Layak, yaitu desa sasaran yang telah difasilitasi sarana dan prasarana melalui Pamsimas hingga saat ini masih berjalan dengan baik (status aktif), sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air bersih mengingat PDAM terbatas untuk dapat menjangkau desa-desa yang jauh dari pusat perkotaan.
- (3) Perilaku Hidup Sehat dan Bersih Masyarakat, yaitu dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Muruk Rian dapat mengubah perilaku pola hidup sehat masyarakat setempat, karena masyarakat tidak perlu lagi untuk ke sungai mengambil bahkan untuk BAB di sungai yang jauh dari pemukiman.
- (4) Keberlanjutan Pamsimas, yaitu untuk mencapai hasil maksimal tujuan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana, maka pemerintah setempat gencar melaksanakan sosialisasi melalui pendekatan-pendekatan seperti 1) Pendidikan dan Komunikasi; 2) Model Perilaku, yaitu program ini juga menggunakan model peran sebagai cara untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Dengan melibatkan tokoh masyarakat atau anggota komunitas yang dihormati, PAMSIMAS dapat menunjukkan contoh praktik sanitasi yang baik dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti.

Temuan penelitian diatas sejalan dengan pendapat (Asmara et al., 2020) tujuan dari kebijakan Pamsimas, yaitu 1) untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat; 2) Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan; dan 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

### **Efisiensi**

Qurniawati, (2013) menjelaskan bahwa di dalam efisiensi terdapat beberapa faktor, yaitu ketika input yang dibutuhkan lebih kecil, dan dapat menghasilkan output yang sama, atau juga dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, dan ketika penggunaan input yang besar dapat menghasilkan output yang jauh lebih besar juga. Efisiensi adalah kata yang menyatakan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dijalankannya dan diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan, (Engka & Natsir, 2024). Karenanya, pelaksanaan Pamsimas dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pelaksanaan kebijakan memiliki luaran berupa aksi, aktivitas, mekanisme dan tindakan yang di bingkai dalam sebuah system, (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Apabila pelaksanaan kebijakan publik dilaksanakan sesuai dengan

system yang telah ditetapkan, tentu akan menghasilkan tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan Pamsimas di Kecamatan Muruk Rian dapat dikatakan efisien dalam pengelolaan sumber daya, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data, baik dari olah data dokumen, observasi dan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan sumber daya manusia yang memadai, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana Pamsimas yang tersebar di desa sasaran Kecamatan Muruk Rian memiliki pembagian kerja dari tingkat Kabupaten sampai pada Pokja di tingkat masyarakat; 2) Dukungan dan realisasi anggaran, yaitu dukungan dan realisasi anggaran dalam menjalankan program berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan anggaran dalam rangka pengembangan dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana Pamsimas di Kecamatan Muruk Rian tidak hanya bersumber dari APBN-Pamsimas, akan tetapi juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tana Tidung, APBN-Hibah Khusus Pamsimas (HKP), APBDDes, INCASH Desa, dan INCAND Desa yang kesemuanya memiliki tujuan agar masalah mengenai air bersih dan sanitasi dapat diatasi dengan baik.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan pendapat (Siregar, 2020) yang menjelaskan bahwa kinerja efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Hal tersebut dapat dicapai apabila dengan mengurangi jumlah penerimaan barang untuk jumlah pembelian yang lebih banyak, (Siregar, 2020). Selain itu, mengenai ukuran efisiensi menurut Dunn, (2003) bahwa seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, karenanya pelaksanaan kebijakan Pamsimas di Kecamatan Muruk Rian hingga saat ini berjalan efisien (sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

### **Kecukupan**

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan yang berlangsung dalam satu kebijakan tertentu, (Mulyadi, 2015). Mengacu pada hal tersebut, maka PAMSIMAS merupakan salah satu kebijakan publik yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Air Minum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan masyarakat dan memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua masyarakat Kabupaten Tana Tidung khususnya Desa sasaran PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian.

Mengenai kinerja kebijakan (Dunn, 2017; Winarno, 2016) menjelaskan bahwa dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria evaluasi untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan public tersebut, salah satunya adalah kecukupan pelaksanaan kebijakan. Kecukupan dalam kebijakan publik menurut (Winarno, 2016) bahwa dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Menurutnya, kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Hasil penelitian di Kecamatan Muruk Rian mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan PAMSIMAS memenuhi kriteria kecukupan, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data,

baik dari data analisis dokumen, observasi maupun hasil olah data hasil wawancara yang menunjukkan bahwa Pamsimas dapat mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi di desa Muruk Rian, selain itu hasil analisis pada indikator efektivitas dan efisiensi menunjukkan bahwa pencapaian Pamsimas yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat Muruk Rian terlepas dari dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, baik dukungan anggaran, tenaga dan pikiran, serta akuntabilitas anggaran para pelaksana kebijakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Praja et al., 2023) dengan judul *Evaluation of Community Participation in Community-Based Water Supply and Sanitation s in Kampung Rantau Jaya Ilir, Central Lampung Regency*, yang menjelaskan bahwa PAMSIMAS di Desa Rantau Jaya Ilir memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat, terutama dalam peningkatan akses dan kualitas air bersih. Namun, peneliti terdahulu hanya menganalisis dari aspek kebermanfaatan PAMSIMAS, sedangkan hasil penelitian ini selain mengkaji aspek kebermanfaatan juga menganalisis aspek kecukupan anggaran, sumber daya manusia dan dampak kebermanfaatan kebijakan Pamsimas.

### **Pemerataan**

Menurut (Mulyadi, 2016) bahwa pemerataan dalam kebijakan publik berarti kebijakan yang diambil harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan. Kebijakan yang diambil tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, tetapi harus memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Kecamatan Muruk Rian telah melaksanakan kebijakan PAMSIMAS sejak tahun 2018-2021 dimana tahun tersebut sudah memasuki fase ke tiga dalam pelaksanaannya. Walaupun Kecamatan Muruk Rian baru mendapatkan bantuan PAMSIMAS di fase ke tiga antara tahun 2018-2021, namun pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fisik sarana dan prasarana sudah meyebar di Desa-Desa sasaran PAMSIMAS yang anggarannya bukan hanya dari APBN, namun juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tana Tidung, APBN-Hibah Khusus Pamsimas (HKP), APBDes, INCASH Desa, dan INCAND Desa yang hingga saat ini digunakan dan dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Dunn, 2017) bahwa kriteria pemerataan dalam kebijakan public adalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di Desa sasaran PAMSIMAS menunjukkan bahwa dari jumlah kepala keluarga di Kecamatan Muruk Rian, Sebagian besar sudah mendapatkan dan dapat mengakses air dari hasil pembangunan dan pengembangan PAMSIMAS sejak tahun 2018-2021 selain dari layanan PDAM. Pemanfaatan penyediaan air minum di Kecamatan Muruk Rian bukan hanya dapat diakses oleh masyarakat dipusat perkotaan atau yang dekat dari penampungan air, namun juga dapat diakses oleh masyarakat di pedalaman yang bertujuan untuk mempersempit jurang antara kelompok yang lebih dan kurang beruntung, serta mendorong distribusi sumber daya yang lebih adil. (Rawls, 1971) dalam bukunya yang berjudul "A Theory of Justice" bahwa kebijakan yang adil harus memastikan distribusi sumber daya yang merata dan menguntungkan kelompok yang kurang beruntung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa air yang didapatkan masyarakat di PAMSIMAS memberikan dampak positif kepada masyarakat, seperti terpenuhinya kebutuhan air rumah tangga, teratasinya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan air, dan yang terpenting adalah penerima manfaat sudah tidak lagi ke sungai untuk mengakses air yang jauh jaraknya dari pemukiman. Pemerataan dalam implementasi kebijakan public sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Hammond et al., 2022) dan merupakan prasyarat untuk mencapai keadilan sosial. Karena, menurutnya tanpa distribusi yang adil dari manfaat dan beban kebijakan, kesenjangan sosial ekonomi akan

semakin melebar dan dapat memicu ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Pemerataan memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses yang setara terhadap pelayanan publik dan kesempatan untuk berkembang.

### **Responsivitas**

Responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik merujuk pada kemampuan pemerintah atau lembaga publik untuk mengenali, memahami, dan menanggapi kebutuhan, tuntutan, serta aspirasi masyarakat secara efektif dan tepat waktu dalam proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator responsivitas berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam mengatasi ketimpangan dan kesenjangan penyediaan air dan sanitasi bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati fasilitas air dari PDAM dimanifestasikan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 54 Tahun 2018 tentang Rencan Induk Sistem Penyediaan Air Minum. Upaya ini merupakan wujud dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam memenuhi target pemenuhan air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sejalan dengan Pelaksanaan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Tana Tidung tentang PAMSIMAS di Desa Sasaran Kecamatan Muruk Rian berdasarkan data dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2021 fasilitas PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian Sebagian besar sudah diakses dan digunakan oleh masyarakat, bahkan untuk keberlanjutan keberfungsian fasilitas pembangunan PAMSIMAS, pemerintah Desa menganggarkan biaya operasional untuk biaya perawatan sarana dan prasarana PAMSIMAS, sehingga dapat memuaskan masyarakat dalam pemenuhan air bersih. Hal ini sejalan dengan (Dunn, 2017) yang menjelaskan bahwa responsivitas berkenaan dengan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

Menurut (Nisa et al., 2023; Utami, 2023) bahwa responsivitas (*responsiveness*) adalah kemampuan pemerintah (organisasi) untuk mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, menurut (Mulyadi, 2016) bahwa responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya sekadar menanggapi, tetapi juga tentang kualitas dan ketepatan respons pemerintah terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik. Responsivitas melibatkan kemampuan untuk mengantisipasi, mengelola, dan menyelesaikan masalah publik secara efektif.

### **Ketepatan**

Ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan publik merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan dan efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak aspek yang menjadi tolak ukur untuk melihat ketepatan pelaksanaan kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan oleh George C. Edward III (dalam Desrinelti et al., 2021; Ramdhani & Ramdhani, 2017) bahwa ketepatan disposisi pelaksana kebijakan, termasuk pemahaman, dukungan, dan konsistensi dalam melaksanakan kebijakan, sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Disposisi ini mengacu pada sikap, komitmen, dan kemauan dari para pelaksana kebijakan. Sedangkan, dalam hasil penelitian (Chusniati, 2018) yang berjudul Implementasi kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Trenggalek melihat ketepatan cakupan layanan, seperti persentase rumah tangga yang terlayani oleh program PAMSIMAS dan persentase populasi yang memiliki akses terhadap air minum

yang aman dan layak. Hasil penelitian di Kecamatan Muruk Rian menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan PAMSIMAS cukup merata, hal ini dapat dilihat dari jumlah kepala keluarga Kecamatan Muruk Rian sebanyak 531 KK dan yang sudah merasakan akses layanan terhadap air minum sebanyak 390 KK.

Selain itu, hasil penelitian di Kecamatan Muruk Rian mengenai pelaksanaan kebijakan PAMSIMAS dinilai tepat sasaran, karena jumlah perencanaan anggaran sesuai dengan laporan realisasi anggaran, bahkan penyelesaian pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana diselesaikan dengan baik sesuai dengan durasi waktu perencanaan. Menurut Goverde (dalam Bintang et al., 2020) menjelaskan bahwa ketepatan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan di masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu dapat dilakukan apabila adanya sinergi antara pihak organisasi pengelola dan masyarakat yang menerima manfaat program dalam hal pelaksanaan dapat mencapai sebuah program dengan tepat pelaksanaannya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini mengenai evaluasi kebijakan PAMSIMAS di Kecamatan Muruk Rian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan ini di desa-desa sasaran berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari beberapa indikator evaluasi kebijakan, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan pelaksanaan. Pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana serta prasarana PAMSIMAS terbukti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran, khususnya dalam penyediaan air minum yang layak. Kebijakan ini juga berperan dalam mengurangi kesenjangan akses air bersih, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan dan tidak memiliki akses terhadap layanan air PDAM. Implementasi program menunjukkan bahwa pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih memberikan hasil yang positif, baik dalam aspek keberlanjutan maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pelaksanaan program ini telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan ke depan, seperti peningkatan kapasitas pengelola lokal, perawatan infrastruktur yang berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi manfaat dari program PAMSIMAS ini.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam menginterpretasikan hasilnya, yaitu 1) cakupan wilayah penelitian hanya terbatas pada desa-desa sasaran di Kecamatan Muruk Rian, sehingga temuan ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi PAMSIMAS di wilayah lain dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda; 2) penelitian ini mengandalkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas responden serta keterbatasan dalam memperoleh informasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait; 3) faktor eksternal seperti keterbatasan anggaran, dukungan teknis, serta keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana PAMSIMAS belum dapat dianalisis secara mendalam, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi aspek-aspek tersebut secara lebih komprehensif; dan 4) keterbatasan dalam jangka waktu penelitian juga menjadi kendala dalam mengamati dampak jangka panjang dari program ini terhadap peningkatan akses air bersih dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas dan pendekatan longitudinal sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik mengenai efektivitas dan keberlanjutan kebijakan PAMSIMAS di berbagai daerah.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa aspek, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan dalam kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks program PAMSIMAS di daerah pedesaan. Dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan air bersih berbasis masyarakat. Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pengelola program, serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PAMSIMAS. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, termasuk strategi peningkatan kapasitas pengelola lokal, pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan, serta penguatan dukungan kebijakan dalam skala yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi masyarakat lokal dengan mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pengelolaan PAMSIMAS, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan program agar lebih berkelanjutan dan berdampak lebih besar. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi studi selanjutnya dalam bidang kebijakan air bersih dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Terima kasih kepada pemerintah daerah serta instansi terkait yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pengumpulan data. Penghargaan juga disampaikan kepada para responden/informan yang dengan sukarela meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan berbagi informasi yang berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada pembimbing atas bimbingan, masukan, dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini.

### **Deklarasi Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini. Seluruh proses penelitian, analisis, dan penyusunan artikel dilakukan secara independen tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil atau kesimpulan yang diperoleh.

### **Referensi**

- Amalia, K. R. (2019). Evaluasi Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Jorong Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Talenta Sipil*, 2(1), pp. 1–7.
- Asmara, M., Yanfika, H., & Wijayanti, G. M. (2020). Tingkat Keberhasilan dan Strategi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sidodadi. *Journal of Planning And Policy Development*, 1(1), pp. 1-13.
- Bintang, G., Lingasari, D., & Angkat, H. (2020). Analisis Tingkat Ketepatan Waktu KRL Commuter Line Lintas Tanah Abang-Rangkasbitung (Studi Kasus: Stasiun Cisauk). *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, pp. 625–638.
- Budiman, A., Husaini, M., & Norjannah, N. (2024). Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat dan Desa Rukam Hilir). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236
- BPKP. (2020). Laporan Kinerja 2019 BPKP Kalimantan Utara. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, pp. 1–112.

- Chusniati, S. (2018). Implementasi kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2).
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. Sage.
- Daniarsyah, D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Kusuka Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(2).
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), pp. 83–88.
- Ditjen Cipta Karya. (2022). Pamsimas 2022 Pedoman Umum Program Pamsimas. <https://pamsimas.pu.go.id/>.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Engka, A. R., & Natsir, N. (2024). Efektivitas Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), pp. 315–325.
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), pp. 1–16.
- Hammond, J., Bailey, S., Gore, O. Z., Checkland, K., Darley, S., McDonald, R., & Blakeman, T. (2022). The Problem of Success and Failure in Public-private Innovation Partnerships. *Journal of Social Policy*, 51(4), pp. 771–791. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0047279421000192>
- Hirawan, Z., & Dinarwati, S. (2022). Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. Tirta Investama Aqua Subang Kecamatan Cislak. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), pp. 180-191.
- Putri, NQ (2020). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Qraved sebagai Media Memilih Tempat Makan. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(1), pp. 22–32.
- Limuris, F. C. (2021). Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(2), pp. 515–532. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/66%0Ahttps://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/66/24>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Data management and analysis methods*. Sage Publications, Inc.
- Mubarok, I. R., & Yafiz, M. (2022). Evaluation of the Impact of the Community Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) in Stabat Lama Village, Kec. Wampu, Kab. Langkat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), pp. 627–632.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. Perangin.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nisa, H., Azwari, T., Ariyani, E., Dewi, A., & Shintia, N. (2023). Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Purwosari II Kecamatan Tamban. *Journal of Social and Policy*, 3(4), pp. 214–220.

- Nurchayono, A., Syam, H., & Sundaya, Y. (2015). Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), p 389. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1477>
- Puspita, D. S., Kawuryan, I. S. S., & Handayani, W. (2023). Evaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS): studi di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 7(1), pp. 71–81.
- Praja, T. T., Rengganis, D. W. S., Iryani, D. A., & Hakim, L. (2023). Evaluation of Community Participation in Community-Based Water Supply and Sanitation Programs in Kampung Rantau Jaya Ilir, Central Lampung Regency. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 5(3), pp. 673–690.
- Qurniawati, R. S. (2013). Efisiensi Perbankan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Return Saham dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(1), pp. 27-40.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), pp. 1–12.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge (Mass.).
- Siregar, A. O. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), pp. 1–19.
- Sugiyono. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto. (2024). *Memahami Esensi Penelitian Kualitatif: Pendekatan, Proses, dan Praktik Terbaik*. Makassar: ASHA Publishing.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), pp. 25–36.
- Utami, I. T. (2023). Analisis Hubungan Responveness, Responsibility dan Accountability Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), pp. 1–14.
- Vitriyana, I., & Budiono, I. (2018). Manajemen Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(3), pp. 374–385
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wulandari, A. S. R., & Ilyas, A. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Gema Keadilan*, 6(3), pp. 287–299